LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Ngurah Rai No. 29, ☎ (0363) 21037 ● Amlapura

e-mail : diskominfo@karangasemkab.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum 5
1.2.1 Tugas dan Fungsi 6
1.2.2 Struktur Organisasi 7
1.2.3 Sumber Daya Diskominfo 8
1.3 Sistematika Laporan 13

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA **14**
2.1 Perencanaan Strategis 14
2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten 15
2.1.2 Tujuan dan Sasaran 17
2.2 Indikator Kinerja Utama 19
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **23**
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 23
3.2 Realisasi Anggaran 41

BAB IV PENUTUP **44**

KATA PENGANTAR

Atas *asung kertawara nugraha* Ida Sang Hyang Widi Wasa, Laporan Kinerja Tahun 2019 dapat disusun sesuai dengan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban perangkat daerah, maka Laporan Kinerja ini adalah hasil realisasi seluruh rangkaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang terjabarkan ke dalam berbagai bentuk program dan kegiatan. Selanjutnya dalam rincian pelaporan kegiatan dipergunakan berbagai tolak ukur yang dirangkum dalam sejumlah indikator yang telah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Karangasem dan renstra perangkat daerah.

Dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance)* yang merupakan prasyarat bagi instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat diterapkan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab. Untuk mencapai tujuan ini, maka laporan yang disajikan dalam Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika telah diusahakan memenuhi segala kriteria dalam hal penyusunan Laporan Kinerja, walaupun masih banyak terdapat kelemahan.

Dengan berhasilnya disusun Laporan Kinerja ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas semua bantuan dan koordinasi tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga bisa disusun dengan baik. Disamping itu kami menyadari bahwa dengan keterbatasan materi ini kami terbuka dengan menerima kritik dan saran demi penyempurnaan laporan ini.

Amlapura, 15 Januari 2020

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Karangasem,

I Komang Daging, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19651023 198602 1 002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan pada rentang waktu 2014-2019. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu, dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Komitmen pemerintah dalam mereformasi birokrasi secara nyata harus ditujukan untuk mempercepat akses pelayanan publik, mereduksi sekat-sekat birokrasi dan regulasi, dan akhirnya percepatan pelayanan itu akan berdampak terhadap kenyamanan publik dalam mendapatkan pelayanan yang optimal. Seiring dengan berjalannya implementasi reformasi birokrasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap kemajuan infrastruktur berbasis IT telah berupaya untuk meningkatkan IT sebagai sarana untuk mempercepat akses informasi, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif.

Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan IT pada Dinas Komunikasi dan Informatika setiap tahun telah berhasil dilaksanakan. Hal ini didorong oleh suatu upaya kerja keras serta adanya dukungan oleh pemegang kebijakan terutama menyangkut sisi anggaran yang lebih memadai. Kemajuan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat saat ini adalah suatu revolusi teknologi baru. karena merupakan suatu teknologi serba guna *(general purpose technology)* yang berpengaruh terhadap teknologi-teknologi lain serta menyebabkan perubahan tatanan yang cukup mendasar dalam kehidupan bersosial, berbudaya, berbisnis, dan berpolitik serta bernegara. Teknologi sangat berkembang pesat dan dipercaya dan belum kelihatan titik jenuhnya. Dengan demikian, pemanfaatannya semakin layak dalam kegunaannya di bidang organisasi, mengubah pola kehidupan dan pola kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan mempengaruhi tatanan sosial.

Perpaduan sejumlah teknologi juga memungkinkan terjadinya *internetworking* yang menyebabkan faktor jarak dan waktu menjadi kurang berarti. Informasi dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain dengan kecepatan yang luar biasa sehingga dapat dimanfaatkan untuk konsolidasi, koordinasi, dan kolaborasi yang mampu menghasilkan tindakan-tindakan dengan pertimbangan keuntungan skala global. Melalui *internetworking* tersebut dapat disebarkan informasi dalam jumlah besar untuk membentuk opini publik yang dikendalikan oleh penyebar informasi. Teknologi informasi telah membawa dunia menuju era informasi yang merupakan sumber daya paling penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk tujuan-tujuan tertentu. Dengan kecepatan dan penyebarannya yang sangat tinggi, informasi sangat mungkin difungsikan sebagai suatu senjata strategis dalam memenangkan persaingan antar bangsa.

Sejalan dengan berkembangnya teknologi, perkembangan informasi di masyarakat juga semakin deras yang berjalan cepat, aktual, bersifat global, serentak, dan interaktif. Media elektronik tidak lagi terkendala periodisitas. Saat terjadi perintiwa besar, serentak beredar informasi dan interaksi. Karena interaktif, informasi pun sekaligus bermakna komunikasi. Inilah realitas baru informasi; berkat revolusi informasi dan komunikasi, publik menjadi konsumen dan sekaligus produsen informasi.

Keterbukaan informasi telah membawa pula dampak pada pembenahan pelayanan di bidang informasi. Hal ini sangat penting, mengingat pelayanan informasi publik dari pemerintah kepada masyarakat selama ini belum optimal. Selain terjadinya paradigma,

media massa dalam pemberitaanya juga sering memasukan setting media yang berakibat apa yang dilakukan pemerintah tidak mendapat porsi yang sebenarnya dalam pemberitaannya di media massa.

Sehubungan dengan fungsi komunikasi dan informatika, Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Karangasem menjalankan fungsinya antara lain pemenuhan hak tahu publik, mengakomodir aspirasi masyarakat untuk informasi dan perumusan kebijakan publik dan citra positif badan publik. Informasi berada dalam garda depan kompetisi mendahului aset-aset yang lain. Untuk itulah, sejalan dengan pencerdasan bangsa dan masyarakat oleh penggunaan teknologi informasi, maka dalam menunjang kinerja birokrasi diarahkan pada optimalisasi teknologi informasi dalam pemerintahan yang dikenal dengan *electronic government (e-Gov)* menuju *good governance.*

Ada suatu pola sinergis antara penerapan *e-government* dengan tercapainya *good governance*. Jalur pelayanan birokrasi yang pendek, cepat, efisien, dan efektif serta mempermudah akses masyarakat dengan pemerintah yang sangat memungkinkan akses kontrol masyarakat adalah manfaat kemajuan pemanfaatan media elektronik. Melalui media elektronik, pekerjaan yang berskala besar serta pelayanan yang sangat cepat akan dapat dilaksanakan secara optimal.

Sehubungan dengan Laporan Kinerja, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menegaskan bahwa Laporan Kinerja adalah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis *(strategic planning)* yang ditetapkan.

Dalam sistem akuntabilitas instansi pemerintah, LAPORAN KINERJA berisikan rencana strategis dan akuntabilitas kinerja. Rencana strategis, memuat penetapan visi, misi,

tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan dalam kurun waktu 5 (lima tahun) yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kinerja tahunan (Dokumen RKT) dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

Laporan Kinerja yang disampaikan oleh instansi pemerintah bermanfaat untuk; (a) meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas instansi dimata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi, (b) merupakan umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah, (c) dapat mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi, (d) mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan (e) menjadikan instansi yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dilandasi dasar hukum sebagai berikut.

a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
b. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
c. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
e. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
f. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
g. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 39/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
h. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

i. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja.
j. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/20/Menpan/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
m. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
n. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
o. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
p. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem merupakan instansi pelaksana dan bagian dari Pemerintah Kabupaten. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan OPD dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja OPD Kabupaten Karangasem yang mengatur tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut.

Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika

1.2.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan OPD dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja OPD Kabupaten Karangasem, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

(a) Perumusan kebijakan meliputi urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.

(b) Pelaksanaan kebijakan meliputi urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.

(c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan meliputi urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik

(d) Pelaksanaan administrasi dinas meliputi urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.

(e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi tersebut mengacu pada ketentuan hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2001 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan hukum dimaksud, dan dalam hal urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, ada 3 hal yang dijadikan kriteria yaitu: (1) **eksternalitas,** maksudnya bahwa tingkat urusan pemerintahan yang berwenang atas

urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut; **(2) akuntabilitas,** maksudnya untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan klaim atas dampak tersebut atau yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut; **(3) efisiensi,** penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis.

1.2.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) terdiri atas seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III), 3 (tiga) orang Kepala Bidang (Eselon III), dan 11 Kepala Seksi (Eselon IV). Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja OPD Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut.

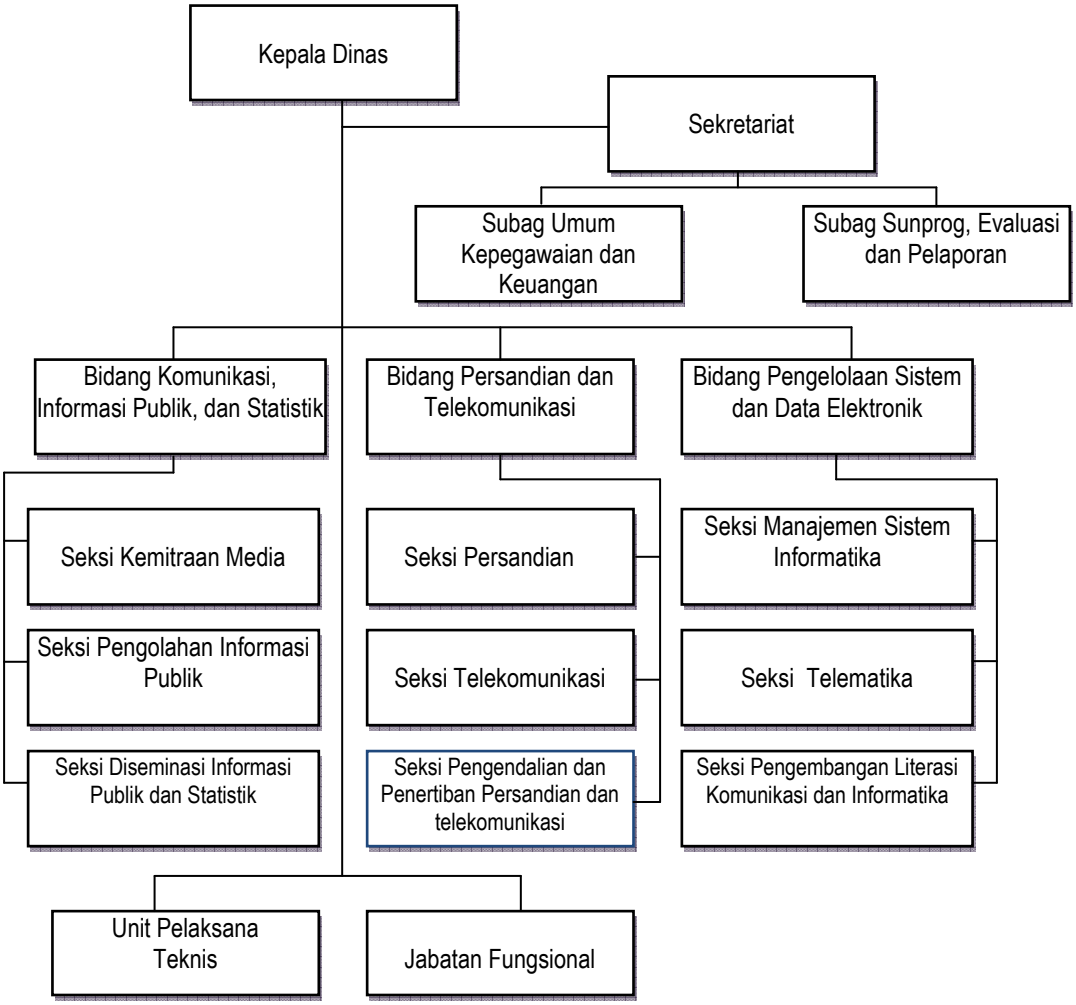

Bagan/Tabel 1.1 Struktur Diskominfo Kab. Karangasem

1.2.3 Sumber Daya Diskominfo

A. Sumber Daya Aparatur

Dalam menggerakkan roda organisasi, perlu ditunjang dengan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan pegawai sehingga segala tupoksi organisasi berjalan baik. Sumber daya aparatur secara terus-menerus perlu dikembangkan dengan pendidikan formal maupun non formal karena instrument penting dalam memajukan organisasi terletak pada kualitas sumber daya manusia yang memadai. Pengembangan sumber daya manusia saat ini dituntut untuk mampu mengadopsi dan mengaplikasikan kemajuan teknologi informasi sebagai suatu media yang sangat membantu penyelesaian pekerjaan, efektifitas kerja, efisiensi anggaran, dan peningkatan pelayanan publik.

Dilihat dari kualitas pendidikan dan kuantitas yang ada, sumber daya aparatur yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika sampai saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Daftar Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Sesuai Kualifikasi Pendidikan

No.	Sumber Daya Aparatur (PNS) Berdasarkan			Prosentase	Keterangan
A.	**Jenjang Pendidikan**	**Kualifikasi Pendidikan**	**Jumlah (0rg)**		
	S2	Magister Budaya dan Agama	2	46,67%	Persentase ini membandingkan antara jumlah PNS yang sarjana dengan yang belum sarjana
		Magister Administrasi Publik	2		
	S1	Ekonomi Manajemen	6		
		Sarjana Tekhnik	1		
		Sarjana Hukum	3		
		Sarjana Sosial	1		
		Sarjana Komputer	4		
		Sarjana Sastra	1		
	Jumlah		**20**		
	SMA		9	53,33%	
	Jumlah		**9**		
B.	**Jenis Kelamin**				
	Laki		19		
	Perempuan		10		
	Jumlah PNS		**29**	58,82%	% jumlah PNS dan Tenaga Kontrak
C.	**Tenaga Kontrak**		**20**		
	Jumlah Tenaga Kontrak		20	41,18	
	Jumlah Total		**49**		

Tabel 1.3 Daftar Pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika Sesuai keadaan dan kebutuhan

No.	Pejabat Struktural	Jabatan Yang Ada	Jabatan Yang Terisi		Jabatan Yang Tidak Terisi
			Laki	Perempuan	
1	Eselon IIb	1	1	-	-
2	Eselon IIIa	1	1	-	-
3	Eselon IIIb	3	2	1	-
4	Eselon IVa	11	7	4	-
Jumlah		16	11	5	-

Tabel 1.4 Daftar Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Sesuai Kualifikasi Pendidikan

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1	Juru Muda (I/a)	-	-	-
2	Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-
3	Juru (I/c)	-	-	-
4	Juru Tk. I (I/d)	-	-	-
5	Pengatur Muda (II/a)	1	-	1
6	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	1	2
7	Pengatur (II/c)	1	1	2
8	Pengatur Tk. I (II/d)	2	-	2
9	Penata Muda (III/a)	1	1	2
10	Penata Muda Tk. I (III/b)	3	2	5
11	Penata (III/c)	2	2	4
11	Penata Tk. I (III/d)	5	2	7
12	Pembina (IV/a)	1	1	2
13	Pembina Tk. I (IV/b)	1	-	1
14	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
TOTAL :		19	10	29

Sumber daya aparatur seperti persentase di atas menggambarkan tingkat pegawai yang pendidikan formalnya berijazah sarjana belum optimal. Terutama yang kualifikasi pendidikannya berkaitan langsung dengan teknologi informasi sampai saat ini baru terdapat tiga orang yang sarjana komputer. Secara teknis, pendidikan formal seperti ini

sangat diperlukan terutama dalam hal pengembangan kapasitas penunjang *e-government* seperti pengembangan jaringan (LAN dan WAN), pengembangan sistem informasi, pengolahan data berbasis computer. Kekurangan ini bisa diatasi dengan peningkatan kapasitas kemampuan personil dengan pemberian pendidikan dan pelatihan yang memadai.

B. Sumber Daya Pengembangan Informasi dan Telematika

Sejalan dengan pengembangan *e-government* sesuai dengan amanat Inpres Nomor 3 tahun 2003, diperlukan perencanaan yang berupa cetak biru *(blue print)* sebagai dokumen yang dijadikan pedoman dalam tahapan-tahapan pengembangan sistem teknologi informasi. Berdasarkan dokumen perencanaan ini, dilanjutkan dengan penyiapan segala infrastruktur seperti piranti keras dan piranti lunak dan sistem jaringan sistem informasi.

1. Master Plan Pengembangan Teknologi Informasi

Master plan ini nantinya akan dipakai dasar dalam pembangunan teknologi informasi di Kabupaten Karangasem yang pengembangannya diarahkan pada beberapa indikator sebagai berikut.

a. Tersedianya desain sistem informasi bidang perekonomian Pemerintah Kabupaten Karangasem yang merupakan dokumen teknis memuat struktur *database* dan desain antarmuka sistem informasi bidang perekonomian.
b. Tersedianya desain sistem informasi bidang sosial, budaya dan politik, yang merupakan dokumen teknis yang memuat struktur *database* dan desain antarmuka sistem informasi bidang sosial, budaya dan politik.
c. Tersedianya standar operasional prosedur (SOP) sistem informasi dan telematika yang dijadikan dokumen pengaturan tata kerja pemannfaatan teknologi informasi .

2. Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web

Desain informasi dalam web sangat efektif digunakan oleh pengguna informasi di seluruh tempat dengan bantuan akses internet. Sarana website pemerintah daerah Kabupaten Karangasem telah pula dikembangkan dengan subdomain-subdomain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsi website antara lain sebagai berikut.

1. Fungsi komunikasi. Situs web yang mempunyai fungsi komunikasi dan dilengkapi fasilitas yang memberikan fungsi-fungsi komunikasi, seperti web mail, form contact, chatting, forum, dan yang lainnya.

2. Fungsi informasi. Situs web yang memiliki fungsi informasi pada umumnya lebih menekankan pada kualitas bagian kontennya karena tujuan situs tersebut adalah menyampaikan isinya. Situs ini berisi teks dan grafik yang dapat diunduh *(download)* dengan cepat.
3. Fungsi *entertainment.* Situs web juga dapat digunakan untuk *entertainment*/hiburan. Web dilengkapi animasi gambar dan elemen bergerak yang dapat meningkatkan mutu presentasi desainnya, meski tetap harus mempertimbangkan kecepatan *download*-nya. Beberapa fasilitas yang memberikan fungsi hiburan adalah game online, film online, musik online, dan sebagainya.
4. Fungsi transaksi. Situs web dapat dijadikan sarana transaksi bisnis, baik barang, jasa, atau lainnya. Situs web ini menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik. Pembayarannya bisa menggunakan kartu kredit, transfer, ataupun dengan membayar secara langsung.

3. Hotspot

Hotspot adalah salah satu bentuk pemanfaatan teknologi *wireless local area network (LAN)* pada lokasi-lokasi publik. Hotspot memungkinkan pengguna wifi *(wireless fidelity)* untuk terhubung dengan pusat titik akses internet (hotspot). Adapun fungsi hotspot ini ditujukan terutama untuk masyarakat sekitar *(hotspot area)* dalam mengakses internet dengan gratis. Peningkatan layanan melalui hotspot yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika saat ini kecepatan aksesnya telah ditingkatkan dengan pertimbangan kuantitas pengguna yang semakin meningkat.

C. Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan prasarana pendukung untuk melaksanakan kegiatan pada seluruh unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut.

Tabel 1.5 Tabel sarana dan prasarana

No.	Nama Barang	Kondisi	
		Baik	Rusak
1	**Bangunan**		
	Gedung	2 unit	-
2	**Alat Angkutan**		
	Mobil operasional	3 unit	2 unit
	Sepeda Motor Operasional	4 unit	4 unit
3	**Perlengkapan Kantor**		
	Meja biro	30 buah	5 buah
	Kursi	158 buah	10 buah
	Lemari katalog	2 buah	-
	Lemari Kaca	4 buah	-
	Lemari penyimpan arsip	4 buah	-
	Filling Kabinet	4 buah	-
	Komputer	29 unit	7 unit
	Server	4 unit	-
	Laptop	10 unit	5 unit
	Printer	11 unit	3 unit
	UPS	4 unit	6 unit
	Kamera	5 buah	2 buah
	Handi Cam	-	1 buah
	Infocus	1 buah	-
	Sofa	2 set	-
	AC Ruangan	11 buah	3 buah
	Papan	2 buah	-

Menyimak dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana kerja yang digunakan cukup memadai. Jumlah sarana kerja yang digunakan secara langsung seperti komputer dan perlengkapannya sudah mencukupi untuk semua unit kerja. Untuk sarana perlengkapan kantor sebagai sarana penunjang dari segi kuantitas memang masih ada yang perlu di tambah karena dari segi umur sudah layaknya diadakan penghapusan dari aset daerah. Segala sarana yang ada diusahakan dapat menunjang pelaksanaan seluruh kegiatan sehingga bisa terlaksana dengan baik.

1.3 Sistematika Laporan

Penulisan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Gambaran Umum

1.2.1 Tugas dan Fungsi

1.2.2 Struktur Organisasi

1.2.3 Sumber Daya Diskominfo

1.3 Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

2.2 Indikator Kenerja Utama

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran kedepan yang harus dilakukan untuk kemajuan pemerintah Kabupaten Karangasem.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis yang dituangkan melalui dokumen renstra adalah proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, sasaran, indikator sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Sebelum ditetapkannya tujuan organisasi, langkah paling awal dirumuskan adalah uraian visi yang merupakan cara pandang jauh kedepan yang memberikan gambaran akan sebuah capaian kondisi tertentu dan pada waktu tertentu. Berdasarkan visi ini, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan cara dan langkah terhadap hal-hal yang harus dikerjakan dalam usaha pencapaian visi. Dalam misi terkandung uraian sektor-sektor mana yang harus dikerjakan melalui perubahan-perubahan yang signifikan dengan kondisi ke depan yang meningkat dan lebih baik. Selanjutnya barulah memilih tujuan organisasi, sasaran, indikator, strategi, pemilihan dan pengkajian program terpilih, dan penentuan alternatif kegiatan.

Sehubungan dengan penetapan dokumen rencana strategis, Dinas Komunikasi telah menyusun renstra tahun 2016-2021. Dengan acuan RPJMD Kabupaten Karangasem 2016-2021, renstra yang disusun merupakan dokumen sinergis dan acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun program dan kegiatan. Rencana strategis ini menempati posisi yang krusial, karena menentukan kekomprehensifan, kekoherenan, dan keseimbangan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah yang dihasilkan oleh organisasi. Perencanaan strategis menghasilkan keluaran yaitu, (1) sasaran strategis *(strategic objective),* (2) inisiatif strategis *(strategic initiatif)* dan (3) target. Perencanaan strategis merupakan suatu proses manajemen yang sistematis yang dapat diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan atas program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan dalam setiap program selama beberapa tahun ke depan.

Beberapa hal yang melandasi pentingnya suatu organisasi membuat perencanaan strategis adalah; (a) perencanaan strategis memberikan kerangka dasar bagi perencanaan-perencanaan lainnya, (b) pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya, dan (3) perencanaan strategis merupakan titik permulaan bagi penilaian kegiatan manajer dan organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategis bagi suatu organisasi sangat penting, karena tanpa strategi dalam

mengelola organisasi seorang manajer seolah-olah melangkah dalam ketidakpastian. Perencanaan strategis merupakan faktor internal yang penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten

Visi SKPD lahir dari rumusan visi Kabupaten Karangasem yaitu "***" Karangasem Cerdas, Bersih Dan Bermartabat Berlandaskan Tri Ita Karana"*** . Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika serta mengacu pada visi Kabupaten Karangasem, maka rumusan visi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

"Terwujudnya Transparansi Komunikasi dan Informatika Menuju Masyarakat Karangasem Cerdas, Bersih, Bermartabat, Berlandaskan Tri Hita Karana"

Rumusan visi tersebut didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan informatika.

Visi dapat dioperasionalkan melalui beberapa pemahaman sebagai berikut.

- Transparansi komunikasi dan informatika mengandung pemahaman atas kondisi seluruh unsur penyelenggara negara baik secara individual maupun institusional mampu bekerja secara profesional, integritas, akuntabel sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam aspek prosedural operasional, transparansi komunikasi dan informatika dipahami sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai dan dapat dijangkau oleh publik. Dalam menunjang keterbukaan informasi kepada publik, peran teknologi akan sangat membantu kecepatan akses informasi dan layanan publik. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan Informasi Publik merupakan salah

satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;

- Menuju Masyarakat Karangasem Cerdas, Bersih, Bermartabat, Berlandaskan Tri Hita Karana artinya dalam pengelolaan komunikasi dan informatika bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dibarengi dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan memiliki daya saing serta harus bersandarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan dimanfaatkan untuk pengembangan budaya daerah. Hal ini dipahami sebagai suatu kondisi ideal yang ingin dicapai oleh pembangunan dan pelayanan komunikasi dan informatika berbasis pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Informasi diberikan seluas-luasnya bagi masyarakat di seluruh wilayah sesuai dengan nilai-nilai etika budaya dan agama. Melalui informasi diarahkan untuk masyarakat menjadi cerdas, birokrasi bersih dan bermartabat.

Untuk mengoperasionalkan visi, maka ditetapkan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem sebagai berikut.

1. **Meningkatkan kapasitas dan kualitas Infrastruktur Jaringan, Lembaga Komunikasi, dan Pemanfaatan Media Internet Yang Lebih Luas**
2. **Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Perencanaan Pengembangan TIK**
3. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Handal Dibidang TIK**
4. **Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik**
5. **Meningkatkan kapasitas pengelolaan telekomunikasi**

Sesuai dengan tugas dan fungsi, misi tersebut dapat dilaksanakan melalui beberapa langkah-langkah.

1. **Merumuskan dan meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan pemantapan pelaksanaan komunikasi dan informatika;**
2. **Melaksanakan dan meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemantapan komunikasi dan informatika;**
3. **Memastikan kualitas dan efektivitas pelaksanaan pemantapan komunikasi dan informatika melalui monitoring dan evaluasi.**

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis *(strategic goals)* organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, maka dapat diketahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Komunikasi dan Informatika mengukur sejauh mana misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Adapun tujuan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut.

1. **Terwujudnya kemitraan informasi dan jaringan yang terintegrasi di setiap OPD serta sistem layanan informasi berbasis web**
2. **Terwujudnya Data Perencanaan Pengembangan Komunikasi dan Informatika**
3. **Terwujudnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Berbasis Aparatur dan Masyarakat Yang Handal Dalam TIK**
4. **Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Secara Luas dan Merata**
5. **Terwujudnya Pengelolaan dan Pelayanan Telekomunikasi Yang Merata dan Berkualitas**

B. Sasaran

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, sasaran yang ingin dicapai adalah sasaran sebagaimana dirumuskan dalam RPJM 2016-2021. Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Keselarasan RPJMD dan Sasaran Strategis

Arah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sesuai RPJMD 2016-2021	Sasaran Strategis Pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Unit Kerja
Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar komunikasi dan informatika antara lain: (1) Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. (2) Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi informatika, meliputi: (i) Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem (ii) Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.	Meningkatnya fungsi TIK sebagai media pengembangan komunikasi dan pemanfaatan informasi yang edukatif dan akuntabel	Bidang PSDE
	Meningkatnya Pemanfaatan TIK Yang Berdampak Pada Efisiesi dan Transparansi Pelaksanaan Program Pemerintah Daerah	Bidang PSDE
	Meningkatnya Mutu Kinerja dan Pelayanan Berbasis TIK	Bidang PSDE
	Meningkatkan Jumlah Penyebaran dan Layanan Informasi Publik Secara Efektif, Berdaya Guna dan Berhasil Guna	Bidang Kominfo dan Statistik
	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan layanan telekomunikasi secara merata dan memadai yang menjangkau seluruh wilayah	Bidang Santel

Untuk mengukur capaian terhadap sasaran strategis di atas, maka pengukurannya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2 Keselarasan Misi, Sasaran, dan Indikator Sasaran

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan kapasitas dan kualitas Infrastruktur Jaringan, Lembaga Komunikasi, dan Pemanfaatan Media Internet Yang Lebih Luas	Meningkatnya fungsi TIK sebagai media pengembangan komunikasi dan pemanfaatan informasi yang edukatif dan akuntabel	Persentase Organisasi Perangkat Daerah dan fasilitas umum yang terkoneksi wifi secara memadai
		Jumlah kunjungan layanan internet secara edukatif ke kecamatan (kali)
		Persentase kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dijadikan mitra komunikasi dan informasi pemerintah daerah
		Persentase pengembangan subdomain website Pemerintah Daerah yang informatif dan edukatif di setiap OPD
Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Perencanaan Pengembangan TIK	Meningkatnya Pemanfaatan TIK Yang Berdampak Pada Efisiesi dan Transparansi Pelaksanaan Program Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya fasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE)
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Handal Dibidang TIK	Meningkatnya Mutu Kinerja dan Pelayanan Berbasis TIK	Jumlah SDM yang terdidik dan terlatih IT (orang)

Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik	Meningkatkan Jumlah Penyebaran dan Layanan Informasi Publik Secara Efektif, Berdaya Guna dan Berhasil Guna	Persentase layanan pengaduan on line dari masyarakat kepada pemerintah yang ditindaklanjuti dengan akuntabel dan tepat waktu
		Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat
		Jumlah penyebarluasan majalah informasi bidang komunikasi dan informatika sebagai media informatif, komunikatif, dan edukatif (eksemplar)
Meningkatkan kapasitas pengelolaan telekomunikasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan layanan telekomunikasi secara merata dan memadai yang menjangkau seluruh wilayah	Persentase pendirian menara telekomunikasi yang patuh regulasi
		Persentase persandian pemerintah daerah yang tertangani dengan benar dan tepat waktu
		Persentase terpenuhinya sarana komunikasi pemerintah daerah melalui repeater

2.2 Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) tahun 2019 untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Karangasem 2016-2021. Adapun indikator kinerja utama yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama 2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Terwujudnya kemitraan informasi dan jaringan yang terintegrasi di setiap OPD serta sistem layanan informasi berbasis web	Meningkatnya fungsi TIK sebagai media pengembangan komunikasi dan pemanfaatan informasi yang edukatif dan akuntabel	Persentase Organisasi Perangkat Daerah dan fasilitas umum yang terkoneksi wifi secara memadai
		Persentase kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dijadikan mitra komunikasi dan informasi pemerintah daerah
		Persentase pengembangan subdomain website Pemerintah Daerah yang informatif dan edukatif di setiap OPD

Terwujudnya Data Perencanaan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Pemanfaatan TIK Yang Berdampak Pada Efisiesi dan Transparansi Pelaksanaan Program Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya fasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE)
Terwujudnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Berbasis Aparatur dan Masyarakat Yang Handal Dalam TIK	Meningkatnya Mutu Kinerja dan Pelayanan Berbasis TIK	Jumlah SDM yang terdidik dan terlatih IT (orang)
Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Secara Luas dan Merata	Meningkatkan Jumlah Penyebaran dan Layanan Informasi Publik Secara Efektif, Berdaya Guna dan Berhasil Guna	Persentase layanan pengaduan on line dari masyarakat kepada pemerintah yang ditindaklanjuti dengan akuntabel dan tepat waktu
		Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat
Terwujudnya Pengelolaan dan Pelayanan Telekomunikasi Yang Merata dan Berkualitas	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan layanan telekomunikasi secara merata dan memadai yang menjangkau seluruh wilayah	Persentase pendirian menara telekomunikasi yang patuh regulasi

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan janji instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem untuk mencapai suatu kinerja tertentu dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya, yaitu berupa hasil atau manfaat. Kewajiban untuk menyusun penetapan kinerja ini diatur dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 butir ketiga dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan SE MENPAN Nomor 31 Tahun 2004 dan terakhir telah diperbarui dengan Peraturan MENPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa perjanjian kinerja dibuat secara berjenjang mulai dari tingkat eselon II sampai ke pimpinan instansi atau kepala daerah. Batas waktu penyampaian PK paling lambat adalah tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Dengan adanya kebijakan tersebut, indikator ini ditetapkan untuk menilai keefektifan pencapaian sasaran-sasaran instansi pemerintah dalam memberikan hasil dan manfaat terutama bagi masyarakat.

Perjanjian kinerja sebagai kumpulan dari beberapa sasaran strategis, maka setiap sasaran strategis dirumuskan indikator kinerja serta target yang telah ditetapkan. Penetapan perjanjian kinerja ini ditetapkan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan pada tahun anggaran bersangkutan. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem tahun 2019 dapat disimak dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya fungsi TIK sebagai media pengembangan komunikasi dan informasi Meningkatnya Pengkajian dan Penelitian bidang komunikasi dan informasi	Jumlah puskesmas, desa adat, dan obyek wisata yang terfasilitasi jaringan intenet	titik	217
		Jumlah kunjungan pemberian layanan internet secara edukatif ke kecamatan	kali	30
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	100
		Persentase pengembangan subdomain website Pemerintah Daerah yang informatif dan edukatif di setiap OPD	%	58
		Persentase terpenuhinya fasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE)	%	100
		Persentase pengumpulan, pengelolaan, dan analisa data statistik sektoral daerah menjadi dokumen statistik sesuai standar dan mutu baku	%	100
		Jumlah SDM yang terdidik dan terlatih memanfaatkan IT sebagai media informasi yang cepat, efektif, dan edukatif	orang	40
2	Meningkatkan Penyebarluasan dan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase aspirasi dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100
		Cakupan diseminasi informasi kepada masyarakat sesuai	%	100

		SPM		
		Jumlah penyebaran majalah informasi bidang komunikasi dan informatika sebagai media informatif, komunikatif, dan edukatif	eksemplar	250
3	Meningkatnya pemerataan jaringan telekomunikasi dan keamanan informasi	Persentase terpenuhinya kesesuaian zonasi menara telekomunikasi di 8 kecamatan	%	100
		Persentase radio pancar ulang (repeater) dengan kondisi baik sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah	%	100
		Jumlah peserta sosialisasi persandian daerah	orang	30

–

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi, maka pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat atas anggaran yang telah digunakan. Pertanggungjawaban kinerja merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, dan juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Dalam penyusunan laporan kinerja 2019 ini, pelaksanaannya mengacu pada RPJMD 2016-2021 dan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika periode yang sama. Selanjutnya berdasarkan indikator kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi kinerja yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pada periode 2016-2021 ditetapkan 5 sasaran strategis dan setiap sasaran strategis ditetapkan kuantitas sasaran rincian sebagai berikut :

a. Sasaran 1 terdiri atas 4 indikator
b. Sasaran 2 terdiri atas 1 indikator
c. Sasaran 3 terdiri atas 1 indikator
d. Sasaran 4 terdiri atas 3 indikator
e. Sasaran 5 terdiri atas 3 indikator

Kuantitas indikator di atas selanjutya dipilih dan ditetapkan menjadi indikator kinerja utama (IKU) dan pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2019. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi satuan organisasi/kerja. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan, karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong pencapaian kinerja tersebut. Pengukuran Kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan

umpan balik, yang merupakan hal yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Melalui pengukuran kinerja diharapkan satuan organisasi dapat mengetahui kinerja dalam suatu periode tertentu. Dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program satuan organisasi/kerja dapat diukur dan dievaluasi. Selanjutnya, dari pengukuran kinerja, setiap instansi dapat diperbandingkan dengan instansi yang sejenis, sehingga penghargaan dan tindakan disiplin dapat dilakukan secara lebih objektif. Fungsi pengukuran kinerja sebagai alat manajemen diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Memastikan pemahaman para pelaksana terhadap ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tidakan untuk memperbaiki kinerja.
4. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam rangka upaya memperbaiki kinerja organisasi.
5. Membantu memahami proses kegiatan, peningkatan yang perlu dilakukan, serta mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Syarat keberhasilan pengukuran kinerja yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika agar terlaksana dengan baik, maka upaya dan langkah-langkah yang dilakukan secara sinergis antara pimpinan dan staf adalah sebagai berikut.

1. Membuat suatu komitmen untuk mengukur kinerja dan memulainya segera. Yang perlu dilakukan adalah segera memulai upaya pengukuran kinerja dan tidak perlu mengharap pengukuran kinerja akan langsung sempurna. Nantinya akan dilakukan perbaikan atas pengukuran kinerja yang telah disusun;
2. Memperlakukan pengukuran kinerja sebagai suatu proses yang berkelanjutan karena pengukuran kinerja merupakan suatu proses yang bersifat iteratif (berulang-ulang). Proses ini merupakan suatu cerminan dari upaya untuk selalu berupaya memperbaiki kinerja.
3. Menyesuaikan proses pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan menetapkan ukuran kinerja yang sesuai dengan besarnya struktur satuan organisasi/kerja, visi, misi, tujuan, dan sasaran.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Tingkat target dan capaian kinerja tahun 2019 dapat disimak dalam beberapa tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian
Persentase Organisasi Perangkat Daerah dan fasilitas umum perkotaan yang terkoneksi wifi secara memadai	80%	100%	100%
Jumlah kunjungan layanan internet secara edukatif ke kecamatan (kali)	30 kali	100%	100%
Persentase kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dijadikan mitra komunikasi dan informasi pemerintah daerah	100%	100%	100%
Persentase pengembangan subdomain website Pemerintah Daerah yang informatif dan edukatif di setiap SKPD	45%	56%	124,44%
Persentase terpenuhinya fasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) pada setiap SKPD	100%	100%	100%
Jumlah SDM yang terdidik dan terlatih IT (orang)	140 orang	100%	100%
Persentase layanan pengaduan on line dari masyarakat kepada pemerintah yang ditindaklanjuti dengan akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat	100%	100%	100%
Jumlah penyebarluasan majalah informasi bidang komunikasi dan informatika sebagai media informatif, komunikatif, dan edukatif	250 eksp	100%	100%
Persentase pendirian menara telekomunikasi yang patuh regulasi	100%	100%	100%
Persentase persandian pemerintah daerah yang tertangani dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase terpenuhinya sarana komunikasi pemerintah daerah melalui repeater	100%	100%	100%

a. Sasaran I : Meningkatnya fungsi TIK sebagai media pengembangan komunikasi dan pemanfaatan informasi yang edukatif dan akuntabel

Sasaran ini menggambarkan pentingnya fungsi pengembangan teknologi informasi sebagai wahana pengembangan dan penyebaraluasan informasi. Penerapan TIK merupakan kebutuhan dan tidak terbantahkan telah mempengaruhi peradaban bangsa dan sebagai sarana penting dalam peningkatan kinerja lingkungan birokrasi. Dibidang kajian pengembangan TIK, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem sudah pernah menyusun kajian berupa penyusunan masterplan pada tahun 2009 sebagai langkah awal dalam pengembangan TIK di Kabupaten Karangasem. Peningkatan kapasitas dan

kualitas serta kajian dibidang ICT akan terus dikembangkan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik government sesuai dengan Inpres Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Elektronik Government.

Pengukuran kinerja pada sasaran strategis I menggunakan formulasi perhitungan indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 3.2 Formulasi Perhitungan IKU Pada Sasaran Strategis I

Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
Persentase Organisasi Perangkat Daerah dan fasilitas umum perkotaan yang terkoneksi wifi secara memadai	$\frac{\text{Jumlah SKPD dan fasilitas umum perkotaan yang tercover wifi}}{\text{Jumlah SKPD dan fasilitas umum perkotaan}} \times 100\%$
Jumlah kunjungan layanan internet secara edukatif ke kecamatan	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan layanan internet}}{\text{Target layanan internet sesuai dokumen anggaran}} \times 100\%$
Persentase kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dijadikan mitra komunikasi dan informasi pemerintah daerah	$\frac{\text{KIM yang dijadikan mitra informasi pemerintah}}{\text{Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM)}} \times 100\%$
Persentase pengembangan subdomain website Pemerintah Daerah yang informatif dan edukatif di setiap SKPD	$\frac{\text{Jumlah subdomain website pada SKPD yang telah ada}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$

Indikator 1 : Persentase OPD dan fasilitas umum perkotaan yang sudah terkoneksi jaringan wifi dengan target 100%. Realisasi atas target kinerja ini adalah 100% dan capaian kinerja 100%

Perluasan jaringan internet sampai dengan tahun 2019 terus dilakukan dengan berbagai pendekatan termasuk dalam hal peningkatan anggaran. Hal ini dilatarbelakangi karena fungsi media internet saat ini semakin berkembang yang menyebabkan faktor jarak tidak menjadi suatu penghalang untuk berkomunikasi atau menyampaikan informasi. Demikian juga dalam meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik, media internet adalah salah satu media untuk mewujudkan good goverment sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana pada setiap instansi dan setiap satuan kerja tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Karangasem. Hal ini didasarkan atas Instruksi Presiden RI nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Penggunaan media internet khususnya pada OPD dan fasilitas umum perkotaan pada tahun 2019 dilakukan dengan perluasan jangkauan akses internet berbasis fiber optik pada seluruh perangkat daerah. Sehingga pada tahun 2019, realisasi atas target penggunaan wifi sebagai sarana kerja sudah menyasar ke seluruh perangkat daerah di Kabupaten Karangasem termasuk kecamatan. Integrasi jaringan ini sangat membantu kinerja pemerintah daerah yang dituntut serba *online* untuk mempercepat dan memudahkan capaian kinerja serta dapat diakses oleh pejabat berkepentingan.

Pengembangan sarana wifi pada Pemerintah Kabupaten Karangasem merupakan proses transformasi mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah daerah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Optimalisasi pemanfaatan jaringan untuk akses informasi inilah yang merupakan prinsip dasar transparansi yang dituju oleh penggunaan TI di pemerintahan termasuk pemerintah Kabupaten Karangasem. Untuk selanjutnya dengan transparansi tersebut maka hal-hal yang disebabkan oleh kekaburan informasi dapat diminimalkan. Berikut disajikan perkembangan jaringan internet dari tahun 2016 s.d. 2019.

Tabel 3.3 Perkembangan jaringan internet dari tahun 2016-2019

Sasaran pengembangan jaringan internet	Target dan Capaian koneksi jaringan internet Tahun 2016-2019											
	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Fasilitas umum perkotaan	3	3	100	3	3	100	3	3	100	10	3	30
SKPD	50	40	80	50	41	82	50	50	100	50	50	100

Dari data tersebut, perkembangan jaringan internet sampai dengan tahun 2019 yang sasarannya ke 50 OPD sudah tercapai 100% dan 10 fasilitas umum perkotaan hanya tercapai 30%. Ditinjau dari target yang tertuang dalam renstra 2016-2021, maka realisasi atas indikator kinerja di atas adalah seperti dalam tabel berikut.

1. Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung secara umum, antara lain :

a. Perencanaan yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan.
b. Daya dukung anggaran yang sudah maksimal.
c. Dukungan pimpinan untuk pengembangan elektronik government melalui sarana pengembangan jaringan internet.

2. Analisis permasalahan/kendala/solusi

Dalam melaksanakan IKU ini ditemukan kendala antara lain:

a. Lokasi SKPD yang tidak tersentral sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana yang lebih luas.
b. Kebutuhan bandwith pada setiap SKPD melalui jaringan fiber optik tersebut masih belum optimal dan memadai.

Solusi alternatif yang harus segera dilakukan diantaranya adalah; (a) dukungan pemegang kebijakan terhadap pentingnya infrastruktur jaringan dalam memfasilitasi kinerja instansi pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat yang berbasis IT, (b) dukungan kebijakan tersebut akan berimbas pada penyediaan anggaran yang memadai, (c) mewajibkan kepada seluruh perangkat daerah untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan internet.

Indikator 2 : Jumlah kunjungan layanan internet secara edukatif ke kecamatan, dengan target 30 kali pelaksanaan. Realisasi atas target kinerja ini adalah 100% dan capaian kinerja 100%.

Indikator kinerja ini adalah sebagai media untuk mewujudkan masyarakat atau pengguna lainnya yang memiliki wawasan luas tentang perkembangan informasi yang pesat terutama melalui media internet. Namun, jika melihat karakteristik pengguna internet terutama di Kabupaten Karangasem, belumlah merata baik dari segi kemampuan sumber daya manusianya maupun aspek ketersediaan jangkauan layanan internetnya. Pada masyarakat atau pengguna yang letaknya masih terisolir, tentu penggunaan media internet masih sangat terbelakang. Di samping pengenalan media internet, layanan intenet ini juga dimaksudkan untuk menanamkan pemahaman intenet sehat kepada masyarakat, siswa atau pengguna lainnya.

Tabel 3.4 Layanan Internet Kecamatan 2016-2019

Target dan Capaian koneksi jaringan internet Tahun 2016-2019											
Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
30 kali	30 kali	100	30 kali	30 kali	100	30 kali	30 kali	100	30 kali	30 kali	100

1. Faktor Pendukung Keberhasilan

   Keberhasilan pencapaian kinerja ini dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung secara umum, antara lain :

   a. Pengguna media internet baik masyarakat, siswa atau pengguna lainnya ingin tahu tentang penggunaan intenet secara sehat.
   b. Penggunaan media internet secara berkualitas yang sasarannya pada siswa sekolah akan dapat meningkatkan mutu anak didik.

2. Analisis permasalahan/kendala/solusi

   Dalam melaksanakan kinerja ini ditemukan kendala antara lain:

   a. Kurangnya sarana dan prasarana layanan internet yang khusus yang mobile seperti mobil yang dilengkapi sarana layanan internet.
   b. Masih belum meratanya akses internet terutama pada daerah-daerah yang terisolasi.

Indikator 3 : Persentase kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dijadikan mitra komunikasi dan informasi pemerintah daerah. Realisasi atas target kinerja ini adalah 100% dan capaian kinerja 100%.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan revitalisasi dan reaktualisasi dari kelompencapir yang disesuaikan dengan paradigma pembangunan dan pemerintah dewasa ini dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan *good governance.* KIM berperan dalam memperlancar kontribusi dan distribusi informasi kepada masyarakat dan menjembatani kepentingan masyarakat kepada pemerintah serta mengatasi persoalan bersama melalui akses dan pemberdayaan informasi. Sebagai lembaga informasi, eksistensi KIM dipayungi

oleh peraturan hukum seperti; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 17 Tahun 2009 Tentang Diseminasi informasi nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. Peraturan ini pada prinsinya menegaskan bahwa KIM adalah organisasi informasi yang mandiri dan kreatif yang tumbuh pada setiap daerah dan kiprahnya sangat dibutuhkan dalam membantu kemajuan pembangunan daerah.

. Adapun fungsi KIM dalam hubungannya dengan peningkatan kapasitas informasi di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Sebagai wahana informasi antar KIM, KIM dan Pemerintah secara *bottom up* maupun *top down.*
b. Sebagai peningkatan media literasi informasi dilingkungan anggota KIM.
c. Sebagai lembaga kemitraan yang menjembatani informasi pemerintah dan masyarakat dan mengkritisi Informasi yang tidak sesuai dengan norma dan kultur masyarakat
d. Sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonimis melalui pengelolaan informasi
e. Sebagai lembaga yang mengelola informasi, menyebarkan informasi kepada pihak yang berkompeten, mengembangkan kualitas SDM masyarakat di bidang informasi agar menjadi insan informasi yang tangguh dalam melaksanakan pembangunan.

Dengan tercapainya target pemenuhan KIM pada setiap desa/kelurahan, maka diharapkan media lembaga informasi masyarakat ini akan semakin berkembang. Berdasarkan motivasi yang diberikan kepada setiap desa/kelurahan terhadap pentingnya lembaga KIM. Perkembangan pertumbuhan KIM dari tahun 2011 s.d. 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5 Perkembangan KIM dari tahun 2011-2019

Nama Kecamatan	2011		2012		2013-2019	
	Ds/Klr	KIM	Ds/Klr	KIM	Ds/Klr	KIM
Karangasem	11	10	11	11	11	11
Manggis	12	9	12	9	12	12
Bebandem	8	7	8	7	8	8
Selat	8	7	8	7	8	8
Sidemen	10	9	10	9	10	10
Rendang	6	6	6	6	6	6
Abang	14	12	14	12	14	14
Kubu	9	9	9	9	9	9
Jumlah	**78**	**69**	**78**	**70**	**78**	**78**
%	**88.46**		**89.74**		**100**	

Dalam melakukan kemitraan informasi antara pemerintah daerah dengan KIM diantaranya telah dilakukan dengan melaksanakan suatu upaya dan strategi, antara lain :

a. Melaksanakan sosialisasi informasi secara rutin baik melali pertemuan bersama maupun dengan pembinaan kepada KIM di lapangan.
b. Melakukan tatap muka secara berkala terhadap beberapa informasi penting yang perlu diserap oleh masyarakat melalui KIM.

1. Faktor Pendukung Keberhasilan
   a. Adanya motivasi masyarakat untuk mendapatkan informasi atas kinerja pemerintah. KIM dapat diharapkan sebagai media diseminasi informasi positif dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya.
   b. Dengan kemajuan IT, informasi dengan mudah didapatkan dengan catatan bahwa tidak semua informasi bersifat faktual.
2. Analisis permasalahan/kendala/solusi. Kendala dalam pengembangan KIM diantaranya adalah:
   1. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh setiap KIM sehingga segala aktifitas yang akan dilakukan masih tersendat-sendat. Hal ini mempengaruhi keberadaan KIM yang hanya ada nama namun tanpa aktifitas.

2. Organisasi KIM bukanlah bersifat finansial profit sehingga minat masyarakat untuk terlibat dalam KIM masih rendah.
3. Kurangnya motivasi dan dukungan atas pemahaman dan pemanfaatan KIM oleh warga masyarakat. Saat ini warga masyarakat pada setiap desa belum mengetahui tentang keberadaan KIM di wilayahnya masing-masing.

Solusi untuk menangani kendala tersebut diantaranya adalah :

1. Melaksanakan pembinaan yang terus-menerus oleh instansi pemerintah kepada KIM. Pembinaan ini diarahkan pada peningkatan kinerja KIM dengan melaksanakan kegiatan dan melaporkannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
2. Meningkatkan kemitraan dengan lembaga pemerintah maupun sesama KIM untuk dan melaksanakan kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan keterbukaan dan kepercayaan
3. Fasilitasi oleh pemerintah berupa fasilitas peningkatan kemampuan akses informasi (sarana jaringan dan perangkat komputer).
4. Perlu diupayakan kelompok-kelompok usaha seperti kelompok tani, kelompok ternak, UKM, dan sebagainya sekaligus sebagai KIM. Dengan demikian, peran informasi di lingkup organisasi atau kelompok tersebut amat dibutuhkan yang disertai oleh peran finansial dan dukungan instansi terkait.

Indikator 4 : Persentase pengembangan subdomain website Pemerintah Daerah yang informatif dan edukatif di setiap Perangkat Daerah dengan target 45%. Realisasi atas target sasaran ini adalah 56% dan capaian kinerja 150%

Peningkatan reformasi birokrasi dicirikan oleh keterbukaan informasi, dominasi teknologi dalam kinerja birokrasi, efisiensi dan transparansi kebijakan pemerintah. Untuk itu, komunikasi data dan penyediaan data secara cepat dapat diakses melalui website. Website juga menjanjikan transparansi dan bisa dilihat dan diakses oleh pengguna termasuk seluruh lapisan masyarakat. Dalam membangun pemerintahan berbasis teknologi, Website Kabupaten Karangasem dengan domain www.karangasemkab.go.id saat ini terus dikembangkan dalam usaha untuk menyelenggarakan layanan informasi. Mengacu pada ketentuan nama domain website pemerintah (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/Per/M.Kominfo/9/2006 Tentang Penggunaan Nama domain go.id

untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah, maka seluruh Perangkat Daerah harus menggunakan nama domain resmi (domain go.id). Sampai tahun 2019, perkembangan subdomain website Pemerintah Kabupaten Karangasem dapat disimak dalam tabel berikut.

Tabel 3.6 Daftar Pengembangan Subdomain Website Pada Pemkab Karangasem s.d 2019

NO	Pemilik Subdomain	Alamat Subdomain	Status
1	Sekretariat Dprd Karangasem	http://setwan.karangasemkab.go.id	Non-aktif
2	Rsud Karangasem	http://rsud.karangasemkab.go.id	Aktif
3	Bagian Administrasi Pemerintahan	http://paten.karangasemkab.go.id	Non-aktif
4	Bagian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	http://jdih.karangasemkab.go.id	Aktif
5	Bagian Pengendalian Pembangunan	http://sip-rfk.karangasemkab.go.id	Aktif
6	Bagian Ekonomi	http://bag-ekonomi.karangasemkab.go.id	Aktif
7	Bagian Perlengkapan	http://bag-perlengkapan.karangasemkab.go.id	Aktif
8	Bagian Organisasi	http://esakip.karangasemkab.go.id	Aktif
9	Bagian Umum	http://elatter.karangasemkab.go.id	Aktif
10	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	http://bappelitbangda.karangasemkab.go.id	Aktif
11	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	http://jafung.karangasemkab.go.id	Aktif
12	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	http://edashboard.karangasemkab.go.id	Aktif
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	http://bpkad.karangasemkab.go.id	Aktif
14	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	http://kesbangpollinmas.karangasemkab.go.id	Non-aktif
15	Inspektorat Daerah	https://wbs.karangasemkab.go.id/	Aktif
16	Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olah Raga	http://pendidikan.karangasemkab.go.id	Aktif
17	Dinas Kesehatan	http://diskes.karangasemkab.go.id	Aktif
18	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	http://dpupr.karangasemkab.go.id	Non-aktif
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	http://sidaringsatru.dpupr.karangasemkab.go.id	Aktif
20	Dinas Ketenagakerjaan	http://disnaker.karangasemkab.go.id/	Aktif
21	Dinas Pemadam Kebakaran	http://damkar.karangasemkab.go.id/	Aktif
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	https://dpppa.karangasemkab.go.id/	Aktif
23	Dinas Ketahanan Pangan	http://ketahananpangan.karangasemkab.go.id/	Aktif
24	Dinas Lingkungan Hidup	http://dlh.karangasemkab.go.id/	Aktif
25	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	http://disdukcapil.karangasemkab.go.id/	Aktif
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	http://dpmd.karangasemkab.go.id	Non-aktif
27	Dinas Perhubungan	http://dishub.karangasemkab.go.id/	Aktif
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	http://diskominfo.karangasemkab.go.id/	Aktif
29	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	http://diskopumkm.karangasemkab.go.id/	Aktif
30	Dinas Pariwisata	http://tourism.karangasemkab.go.id/	Aktif

31	Dinas Kebudayaan	http://disbud.karangasemkab.go.id	Aktif
32		http://petabudaya.karangasemkab.go.id/	Aktif
33	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	http://dpmptsp.karangasemkab.go.id/	Aktif
34	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	http://dispustaka.karangasemkab.go.id/	Aktif
35	Dinas Pertanian	http://pertanian.karangasemkab.go.id	Aktif
36	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	http://disperindag.karangasemkab.go.id	Aktif
37	Satuan Polisi Pamong Praja	https://satpolpp.karangasemkab.go.id/	Aktif
38	Kelurahan Padang Kerta	http://kelurahanpadangkerta.karangasemkab.go.id	Non-aktif
39	Kelurahan Karangasem	http://kelurahankarangasem.karangasemkab.go.id	Aktif
40	Data Pengungsi Karangasem	http://datapengungsi.karangasemkab.go.id	Aktif

Data di atas menggambarkan bahwa sampai tahun 2019 pengembangan website pemerintah kabupaten Karangasem pada 50 perangkat daerah telah mencapai 80%. Perkembangan perangkat daerah yang telah membentuk subdomain website dari tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.9 Capaian Pengembangan Subdomain Website Tahun 2016-2019

Data Perangkat Daerah Yang Telah Membuat subdomain website	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
	17	17	100	20	26	130	22	28	127	24	37	154

Pengembangan website Pemerintah Kabupaten Karangasem difungsikan sebagai berikut.

1. Website sebagai tempat untuk mendapatkan informasi dan berinteraksi. Website bisa digunakan sebagai dijadikan sebagai sarana interaksi antar sesama *netter (*pengguna internet). Melalui website, pengguna bisa memperoleh informasi yang akurat dan tepat karena di dalam website biasanya terdapat informasi yang sedang dicari.
2. Mempermudah komunikasi.Perusahaan ataupun per-orangan bisa menjalin komunikasi melalui email ataupun informasi kontak yang ada pada website. Komunikasi melalui website akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan tidak adanya suatu website. Walaupun adanya perbedaan lokasi sangat jauh dan sudah tentu lebih efisien dalam hal biaya dan waktu.

3. Sarana untuk mempermudah dalam menyampaikan informasi. Dengan adanya website, pesan dan informasi bisnis dapat disampaikan lebih mudah, cepat dan up to date. Cukup dengan menulis dan memosting hal-hal yang diinginkan pada website ingin untuk mengetahui informasi atau pesan informasi.
4. Menghemat biaya dalam komunikasi. Informasi mengenai produk baru dan pesan yang disampaikan kepada orang lain dapat secara mudah bisa dikirim kepada pelanggan atau orang yang menginginkan melalui email dan website.
5. Website dapat digunakan sebagai sarana untuk promosi dari suatu perusahaan atau perorangan yang menjalankan bisnis online. Mempunyai website di internet dapat memperluas jaringan promosi sebuah perusahaan atau bisnis yang sedang Anda jalankan saat ini.

1. Faktor Pendukung Keberhasilan.

   Salah satu faktor pendukung keberhasilan pengembangan subdomain website ini adalah diberlakukannya payung hukum Peraturan Bupati Karangasem Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

2. Analisis permasalahan/kendala.

   Adapun hambatan pengembangan website sebagaimana hambatan dalam pengembangan elektronik government di Kabupten Karangasem adalah sebagai berikut.

   1. Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja). Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari standar *software engineering*.
   2. Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Jarangnya SDM yang handal di bidang teknologi informasi di Kabupaten Karangasem sangat menghambat implementasikan *e-government.*
   3. Kemampuan anggaran yang minim serta infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/Per/ M.Kominfo /12/ 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, pada tahun 2019 pemenuhan target SPM pada semua indikator sudah dapat tercapai, walaupun pada beberapa target perlu penyempurnaan dan peningkatan pelayanan.

Tabel 3.10
Indikator SPM Bidang Komunikasi dan Informatika

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal
		Indikator
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui:
		a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;
		b. Media baru seperti website (media online);
		n. Media tradisionil seperti pertunjukan rakyat;
		d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya;
		e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho
2	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Berdasarkan indikator tersebut, capaian pelaksanaan diseminasi informasi pada kesemua indikator adalah seperti dalam tabel berikut.

Tabel 3.11
Diseminasi informasi 2016-2019

No.	Indikator Diseminasi	Jenis Diseminasi Informasi Yang Terlaksana	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Majalah	Majalah Sinar Agung	1	1	1	1
2	Radio	Dialog Interaktif	15	?	16	12
		Pesan Layanan Informasi	75	75	100	100
		Siaran Langsung Radio	6	6	6	5
3	Televisi	Peliputan TV	6	6	5	12
4	Website Pemda	Update Informasi	Setiap Hari	Setiap Hari	Setiap Hari	Setiap Hari
5	Pertunjukan Rakyat	Bondres	6	6	9	3
6	Sarasehan	Sesuai Tema	2	2	2	2

7	Spanduk	Pemasangan Spanduk Informasi	21	25	25	12
8	Cakupan KIM	Keberadaan KIM Pada Kecamatan	8 Kecamatan	8 Kecamatan	8 Kecamatan	8
9	Koling	Layanan Informasi Keliling	75	75	75	64
10	Pameran	Pameran HUT RI	-	1	1	1

Persentase capaian standar pelayanan minimal pada tahun 2019 pada 6 indikator sudah dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, untuk ke depan perlu ditingkatkan pelayanannya yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat sasaran maupun kualitas penyajian informasinya. Khusus untuk media website, pengisian informasinya disamping bekerjasama dengan instansi terkait, pengembangan subdomainnya tetap perlu ditingkatkan sehingga setiap OPD memiliki subdomain website pemerintah yang editing informasinya dapat dilakukan setiap hari.

Pada pemenuhan pelayanan diseminasi informasi melalui media massa, layanan yang paling prioritas diberikan kepada publik atau masyarakat Kabupaten Karangasem adalah diseminasi informasi melalui dialog radio. Diseminasi melalui sarana radio dirasakan lebih dapat respon dari masyarakat karena komunikasi dan informasi yang terjadi bersifat interaktif. Di samping itu, pelaksanaan dialog radio juga dilaksanakan secara lintas sektor dengan instansi terkait. Selanjutnya pada media website, layanan yang diberikan adalah setiap hari dengan bekerjasama dengan bagian humas dan protokol terkait dengan penginformasian kegiatan pimpinan daerah. Pengembangan layanan informasi melalui website juga diarahkan pada langkah pengembangan subdomain website OPD yang pada tahun 2019 lebih dari 50% sudah memiliki domain website.

Pada layanan melalui media tradisional dan interpersonal, realisasi kegiatannya sudah optimal, hanya saja sasarannya lebih dipilih berdasarkan skala prioritas. Pada ranah media luar ruang yang dilakukan dengan pemasangan spanduk dan baliho, perlu lebih diefisienkan mengingat anggaran yang terbatas. Selanjutnya pada pengembangan kelompok informasi masyarakat (KIM) sebagai mitra informasi pemerintah, sampai pada tahun 2019, 100% desa di Kabupaten Karangasem sudah terbentuk KIM. Namun, diantara seluruh lembaga yang terbentuk, organisasi KIM yang ada perlu diadakan pendataan ulang menyangkut struktur organisasinya sehingga keberadaan KIM sebagai lembaga mitra informasi pemerintah tetap eksis dan berkembang. Sebagai organisasi yang tidak

mengelola anggaran, tentu penyebab hal ini berimbas pada menurunnya tingkat soliditas organisasi. Solusi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja KIM adalah melakukan pembinaan yang berkesinambungan serta pelatihan edukasi dan penyebarluasan informasi.

1. Faktor pendukung keberhasilan. Tingkat diseminasi informasi pada kegiatan ini ditunjang oleh beberapa faktor pendukung, diantaranya :
   a. Regulasi keterbukaan informasi publik berdasarkan UU No. 14 tahun 2008 yang menyaratkan dilaksanakannya diseminasi informasi.
   b. Dukungan anggaran yang sudah memadai dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
2. Analisis permasalahan/kendala. Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini, di antaranya adalah :
   a. Keterbatasan sumber daya manusia pengelola kegiatan baik aspek kuantitas maupun kualitas, karena diseminasi informasi bersifat sangat kompleks dan menyentuh langsung dengan masyarakat.
   b. Sarana dan prasarana yang masih terbatas.

b. Sasaran II : Meningkatnya Pemanfaatan TIK Yang Berdampak Pada Efisiesi dan Transparansi Pelaksanaan Program Pemerintah Daerah

Sasaran ini menggambarkan pemanfaatan aplikasi pemerintah untuk mempercepat capaian reformasi birokrasi yang didukung oleh fungsi teknologi sehingga hal ini juga berdampak baik terhadap efektifitas kerja aparatur di lingkungan birokrasi. Reformasi Birokrasi menyaratkan pengembangan lingkup perkantoran berbasis teknologi informasi. Pengembangan ini akan terus berlanjut untuk mempercepat akses pelayanan publik lebih efektif dan efisien.

Pengukuran kinerja pada sasaran strategis II menggunakan formulasi perhitungan indikator kinerja sebagai berikut.

Table 3.12 Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran Strategis II

Persentase terpenuhinya fasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) pada setiap SKPD	$\frac{\text{Jumlah dokumen pengadaan melalui SPSE}}{\text{Jumlah dokumen pengadaaan barang jasa}}$	x 100%

Indikator 5 : Persentase terpenuhinya fasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) dengan target 100%. Realisasi atas target sasaran ini adalah 100% dan capaian kinerja 100%

Aspek efisiensi dan transparansi erat hubungannya dengan pengelolaan belanja barang dan jasa pada instansi pemerintah khususnya pada pemerintah kabupaten karangasem. Sebelum pemanfaatan teknologi informasi, eksekusi pengadaan barang dan jasa khusunya belanja segala jenis lelang masih bersifat manual sehingga hal ini menimbulkan dampak buruk diantaranya; (a) efisiensi masih terpinggirkan dengan kedok mencari keuntungan sebanyak-banyaknya melalui pengaturan harga yang tidak wajar; (b) terjadi monopoli perusahaan yang memiliki kedekatan dengan penguasa; (c) timbul persaingan tidak sehat. Melalui kebijakan LKPP, maka seluruh pengadaan barang dan jasa pada seluruh lembaga diwajibkan melalui Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik yang diterapkan pada pemerintah Kabupaten Karangasem mulai tahun 2013.

SPSE digunakan untuk fasilitasi pengadaan barang jasa secara elektronik yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Operasional SPSE didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dalam Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bahwa agar pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien serta lebih mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak. Diperlukan perencanaan, pengembangan dan penyusunan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, berkala, terpadu, terarah dan terkoordinasi.

Tabel 3.11 Fasilitasi LPSE s.d 2019

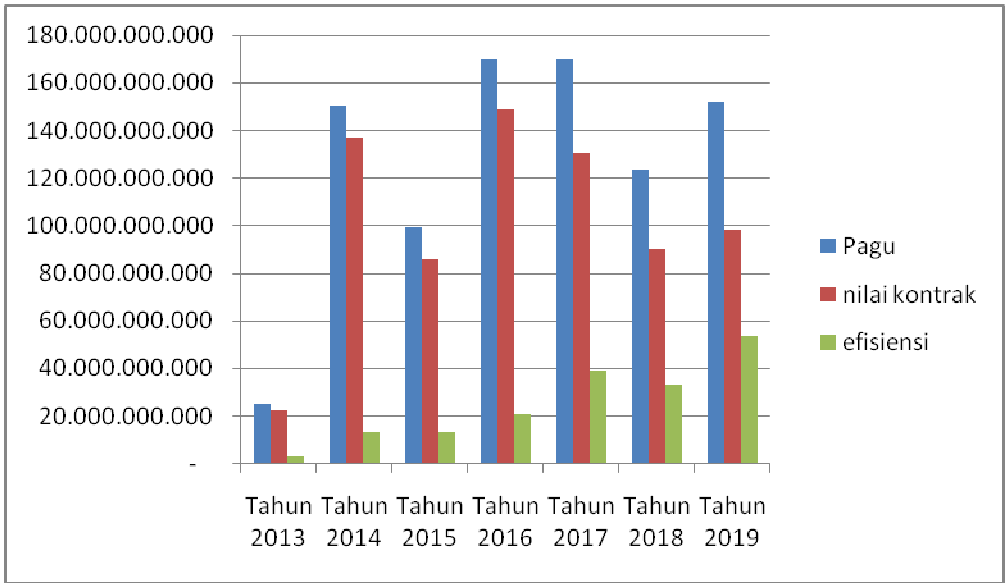

Fasilitasi pengadaan barang dan jasa melalui SPSE Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019 100% sudah melalui LPSE. Sedangkan tingkat efisiensi pada tahun 2019 mencapai 23,06% atau sama dengan tahun sebelumnya yang juga mencapai 23,06%. Dengan demikian, secara menyeluruh, manfaat LPSE adalah; **pertama,** , menyehatkan proses demokratisasi dengan akuntabilitas dan transparasi pengelolaan barang dan jasa. Melalui LPSE masyarakat bisa melihat, ikut serta sebagai penyedia, ataupun mengawasi akuntabilitas proses jalannya pengadaan barang/jasa pemerintah karena semuanya tercatat secara elektronik. **Kedua**, efektifitas yang lebih baik dan mudah dibandingkan melakukan pelelangan secara manual. **Ketiga** adalah efisiensi atau penghematan anggaran yang lebih baik. Berikut disajikan fasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten Karangasem.

Tabel 3.12 Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015-2019	
			Target Renstra	Realisasi	Target Renstra	Realisasi	Target Renstra	Realisasi
1	Persentase e-Tendering melalui SPSE	%	100%	7,26%	100	78,82%	100%	100%

1. Faktor Pendukung Keberhasilan. Keberhasilan kegiatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :
   a. Daya dukung aparatur yang bersertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terus bertambah.
   b. Regulasi dan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang terus berubah menuju ke tingkat yang semakin mudah dan sederhana.

2. Analisis permasalahan/kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik di antaranya adalah daya dukung sarana dan prasarana pengadaan barang dan jasa yang belum optimal, sehingga ke depan terus diupayakan pemenuhannya.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika pada pagu indikatif mengajukan usulan 9 program yang terinci kedalam 33 kegiatan. Dari 33 kegiatan tersebut, total jumlah anggaran pada semua usulan indikatif berjumlah pada belanja langsung adalah Rp. 6.493.586.747

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Karangasem. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.13 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2019

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN	% CAPAIAN	KET.
Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100	
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Sarana Kebersihan	6.332.400,00	6.133.600,00	198.800,00	96,86	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12.816.000,00	12.762.200,00	53.800,00	99,58	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.887.500,00	9.731.200,00	156.300,00	98,42	
5	Pennyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan dan bangunan Kantor	2.500.000,00	2.498.300,00	1.700,00	99,93	

6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	100	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	15.000.000,00	14.160.000,00	840.000,00	94,4	
9	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	125.000.000,00	124.876.430,00	123.570,00	99,9	
10	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis/Keamanan	270.000.000,00	268.200.000,00	1.800.000,00	99,33	
11	Penyediaan Biaya Canang Bebanten Piodalan	30.000.000,00	29.995.000,00	5.000,00	99,98	
12	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	14.000.000,00	13.750.000,00	250.000,00	98,21	
13	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	2.025.746.247,00	2.007.284.946,00	18.461.301,00	99,09	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	37.286.000,00	37.286.000,00	0,00	100	
2	Pemeliharaan rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional	80.000.000,00	78.044.050,00	1.955.950,00	97,56	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	25.000.000,00	24.960.000,00	40.000,00	99,84	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	1.000.000,00	910.000,00	90.000,00	91	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100	
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa						
1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	1.907.900.000,00	1.108.382.597,00	799.517.403,00	58,09	
2	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	35.000.000,00	33.059.900,00	1.940.100,00	94,46	
3	Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan dengan Lembaga Komunikasi Sosial dan Lembaga Komunikasi	30.400.000,00	24.568.850,00	5.831.150,00	80,82	
4	Pemeliharaan dan Pengembangan Website	16.575.000,00	13.933.850,00	2.641.150,00	84,07	
Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi						
1	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	168.770.000,00	159.796.706,00	8.973.294,00	94,68	
2	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	84.785.000,00	67.244.200,00	17.540.800,00	79,31	
Kerjasama Informasi Dengan Mass Media						

1	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	43.795.000,00	32.958.150,00	10.836.850,00	75,26	
2	Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media Cetak,Elektronik,Pertunjukan Seni Tradisional,Saraseha	1.210.369.500,00	1.139.361.673,00	71.007.827,00	94,13	
3	Peningkatan Pelayanan Informasi Pembangunan Daerah	19.000.000,00	17.844.050,00	1.155.950,00	93,92	
Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi						
1	Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	79.025.000,00	77.633.895,00	1.391.105,00	98,24	
2	Pengelolaan Persandian Pemerintah Daerah	78.970.000,00	78.471.625,00	498.375,00	99,37	
3	Pemeliharaan Repeater Pemerintah Daerah	79.865.000,00	79.501.850,00	363.150,00	99,55	
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000,00	6.878.150,00	1.121.850,00	85,98	
Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi						
1	Pelatihan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	45.214.100,00	37.465.000,00	7.749.100,00	82,86	
Pengembangan Wawasan Kebangsaan						
1	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	7.500.000,00	7.449.400,00	50.600,00	99,33	
	JUMLAH	**6.493.586.747,00**	**5.538.991.622,00**	**954.595.125,00**	**89,9**	

Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2019

Uraian			**Alokasi (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**%**
Anggaran Urusan Komunikasi dan Informatika					
1	Belanja Tidak Langsung		3.013.219.435,14	3.007.733.788,00	99,81
2	Belanja Langsung		6.493.586.747,00	5.538.991.622,00	85,29
	a.	Belanja Pegawai	214.736.800,00	97,87703	87,17
	b.	Belanja Barang dan Jasa	5.549.652.947,00	83,02442	82,09
	c.	Belanja Modal	729.197.000,00	98,90969	78,84

BAB IV
PENUTUP

Pelaksanaan anggaran pada tahun 2019 dicerminkan oleh meningkatnya akuntabilitas kinerja dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu yang menjadi identitas dan kebutuhan yang sangat urgen adalah kemajuan dalam pelaksanaan *elektronik government* sebagai alat peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Relevansi antara keterbukaan informasi publik yang wajib dilaksanakan sangat sinergis dengan sarana pemakaian IT seperti tersedianya sistem informasi berbasis web, pelayanan akses internet melalui perluasan hotspot area, peningkatan sarana akses pengguna telepon seluler yang legal disertai dengan peningkatan retribusi yang sangat signifikan, dan yang paling menggembirkan adalah keberhasilan pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui *e-proc*. Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2019 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta staf dalam upaya meningkatkan kinerja. Selain itu, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2019 ini.

Keberhasilan kinerja yang telah tercapai pada saat ini tidak terlepas dari berbagai kelemahan-kelemahan yang sangat mempengaruhi terhambatnya peningkatan kinerja. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1. Kualitas SDM yang masih lemah di beberapa lini yang disebabkan oleh pengalaman kerja yang minim atau spesifikasi pendidikan yang kurang tepat.
2. Dukungan anggaran yang tidak tetap atau pasang surut, sehingga beberapa indikator kinerja utama tidak bisa berjalan setiap tahun. Hal ini menyebabkan tertundanya target pencapaian kegiatan.
3. Pemasangan indikator sasaran yang tidak terukur pada beberapa unit kerja. Kelemahan ini menyebabkan pemasangan target tidak bisa terukur secara tepat, baik dalam kurun waktu tahun anggaran bersangkutan ataupun target dalam waktu kedepan. Kelemahan ini juga akan merembet pada lemahnya akuntabilitas yang harus dilaporkan kepada pihak terkait.
4. Sarana prasarana kantor sebagai sarana penunjang dari segi kuantitas memang masih ada yang perlu di tambah karena dari segi umur sudah layaknya diadakan penghapusan dari aset daerah.

Pembenahan-pembenahan yang harus dilakukan mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut yang perlu mendapat perhatian serius dalam meningkatkan kinerja adalah menyangkut beberapa hal berikut.

1. Peningkatan kualitas SDM. Hal ini bisa ditempuh dengan jalan rekrutmen PNS sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan dan bisa dengan memberi kesempatan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Di samping itu, pemutasian pegawai harus benar-benar diperhatikan sehingga pegawai yang sudah pengalaman dan kemampuan yang sangat dibutuhkan tidak dipindahkan.
2. Terpenuhinya kapasitas struktur jabatan eselon sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.
3. Melakukan lobi kepada instansi terkait agar diberikan dukungan anggaran yang memadai. Untuk melakukan hal ini, maka diperlukan paparan dan argumentasi terhadap kegiatan serta penganggaran yang dibuat.
4. Unit kerja seperti pada sekretariat dan bidang-bidang sebagai pelaksana teknis kegiatan harus mengerti tentang pemasangan tolok ukur kegiatan yang mengacu pada RPJMD, rencana strategis instansi, yang kemudian dituangkan dalam penyusunan rencana kerja dan dokumen penganggaran.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka dukungan dari para pemegang kebijakan sangat diperlukan. Pemerintah daerah harus serius dan memokuskan perhatiannya pada sarana peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkaitan dengan teknologi informasi. Walaupun pada pengadaan barang dan jasa secara elektonik sudah berjalan secara signifikan, tetapi aspek untuk mewujudkan *electronic government* di Kabupaten Karangasem masih banyak yang harus dikerjakan. Pada sisi kualistas SDM, perlu diperhatikan kualifikasi pendidikan yang berhubungan dengan komunikasi dan informatika.